

Apa Itu Ilmu Ekonomi Regional?

Prof. Ir. D.S Priyarsono, M.Si., Ph.D.



PENDAHULUAN

Modul pertama ini menggambarkan garis besar keseluruhan bahasan dalam buku ini, yakni (1) batasan dan landasan ilmu ekonomi regional, (2) pertanyaan dalam ilmu ekonomi regional: bagaimana wilayah tumbuh, dan (3) permasalahan ekonomi regional di Indonesia. Salah satu buku ajar klasik yang dengan bagus membahas landasan ilmu ekonomi regional adalah buku karya Hoover dan Giarratani (1985). Bahasan tentang tiga batu sendi ilmu ekonomi regional yang diuraikan dalam modul ini diilhami oleh bab pertama buku tersebut.

KEGIATAN BELAJAR 1

Batasan dan Landasan Ilmu Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah adalah terjemahan dari *regional economics*. Kadang-kadang ilmu itu disebut juga dengan *spatial economics* yang dapat diterjemahkan menjadi ilmu ekonomi tata ruang. Ilmu ini adalah cabang ilmu ekonomi yang secara khusus mengkaji aspek kewilayahan atau aspek tata ruang. Dalam makna ini, maka batasan ilmu ekonomi regional adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip ilmu ekonomi untuk menjelaskan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan perilaku spasial para pelaku ekonomi dalam mencapai tujuan mereka masing-masing. Contoh pelaku ekonomi adalah rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atau negara.

Perilaku spasial adalah perilaku yang berkaitan dengan tata ruang, misalnya perilaku rumah tangga dalam memilih lokasi rumah untuk mukim. Bergantung seleranya, rumah tangga itu mungkin lebih suka memilih lokasi rumah mukim di tengah kota. Dengan memilih lokasi mukim di tengah kota para anggota rumah tangga itu mungkin menjadi lebih dekat ke tempat kerjanya sehari-hari dan mungkin menjadi lebih mudah menjangkau berbagai fasilitas bisnis seperti pertokoan, pasar, atau perkantoran; fasilitas ekonomi seperti terminal bus, stasiun kereta api, atau akses jalan tol; fasilitas sosial seperti gedung-gedung sekolah, rumah sakit, tempat hiburan, rumah ibadah, dan sebagainya. Di pihak lain, harga lahan di pusat kota lazimnya amat mahal. Karena pendapatan bersifat terbatas, maka rumah tangga yang memilih lokasi mukim di tengah kota harus rela menempati lahan yang relatif sempit untuk tempat mukimnya.

Ada juga selera rumah tangga yang lebih mengutamakan keluasan lahan tempat tinggal. Bila hal itu yang diutamakan maka rumah tangga tersebut dengan ketersediaan dana yang terbatas harus rela tinggal di lokasi yang agak jauh dari pusat kota, dan akibatnya jauh dari berbagai fasilitas. Demikianlah, memang pilihan selalu membawa konsekuensi. Itulah salah satu prinsip ilmu ekonomi, yakni keterbatasan atau kelangkaan sumber daya, dalam hal ini pendapatan rumah tangga, melahirkan pilihan-pilihan yang untuk memperolehnya harus disertai dengan pengorbanan. Rumah tangga yang

memilih tinggal di pusat kota harus rela berkorban dengan tinggal di lahan yang sempit. Sebaliknya, rumah tangga yang memilih tinggal di pinggiran kota supaya menikmati lahan luas untuk tempat tinggalnya harus rela tinggal jauh dari pusat kota tempat tersedianya berbagai fasilitas.

Masalah serupa dihadapi juga oleh perusahaan-perusahaan. Dalam rangka mencapai tujuannya, yakni memaksimalkan laba, perusahaan harus menentukan lokasi kegiatan usahanya, yakni lokasi pabrik, lokasi kantor, dan sebagainya. Dalam hal memilih lokasi pabrik, misalnya, perusahaan harus memperhitungkan apakah lebih baik memilih lokasi yang dekat dengan tempat tersedianya bahan baku atau justru memilih lokasi yang dekat tempat pemasaran produk sehingga dapat meminimumkan biaya transportasi total (*total transportation cost*) yang harus ditanggungnya. Harapannya, bila penerimaan (*revenue*) tidak berubah, maka meminimumkan biaya transportasi sama saja dengan memaksimalkan laba.

Pilihan perusahaan atas lokasi pabrik yang dekat dengan lokasi bahan baku atau dekat dengan lokasi pemasaran produknya bergantung pada jenis dan sifat produksinya. Modul 2 membahas lebih lanjut teori-teori tentang bagaimana perusahaan memilih lokasi bagi kegiatan usahanya.

Pemerintah dalam mengambil keputusan tentang lokasi bagi kegiatan-kegiatannya (misalnya kantor pelayanan masyarakat, dan sebagainya) juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek manfaat dan biaya yang timbul akibat keputusan itu. Supaya terjangkau oleh sebanyak mungkin masyarakat yang dilayani, barangkali pemerintah memilih lokasi yang padat penduduk atau padat kegiatan bisnis. Namun lazimnya harga lahan di lokasi-lokasi demikian relatif mahal. Kemungkinan lain, pemerintah justru memilih lokasi yang masih sepi kegiatan bisnis dan jauh dari lokasi padat penduduk. Dalam jangka pendek mungkin keputusan itu merepotkan masyarakat yang dilayaninya, namun dalam jangka panjang keputusan itu berpotensi membuka daerah baru dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru. Akibat jangka panjangnya adalah adanya perkembangan perekonomian di daerah itu.

Ketiga pelaku ekonomi, yakni rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, semuanya berupaya mencapai tujuan masing-masing. Rumah tangga berupaya memaksimalkan tingkat kepuasannya, perusahaan berupaya memaksimalkan labanya, dan pemerintah berupaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat yang dilayaninya. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu para pelaku ekonomi menggunakan sumber daya yang mereka miliki yang ketersediaannya selalu bersifat terbatas. Dengan

kata lain, persoalan para pelaku ekonomi adalah mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Itulah sebenarnya landasan Ilmu Ekonomi Regional, yang tak lain adalah mikroekonomi dan makroekonomi yang diterapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tata ruang.

Ketiga pelaku ekonomi tersebut berinteraksi dan saling memengaruhi. Hasilnya berupa kesetimbangan (*equilibrium*) tata ruang. Situasi ekuilibrium tercapai apabila setiap pelaku sudah tidak mampu lagi untuk secara sepihak menaikkan taraf pencapaian tujuannya. Dengan kata lain pada situasi ekuilibrium tiap pelaku, dengan kendala-kendala yang dihadapinya, sudah mencapai tingkat maksimum pencapaian tujuannya masing-masing. Ekuilibrium tata ruang terwujud pada struktur-struktur tata ruang dalam sebuah kota dan konstelasi tata ruang antarkota.

Apabila struktur-struktur tata ruang itu dirampatkan (digeneralisasi), maka secara umum dapat disimpulkan berlakunya tiga prinsip dasar Ilmu Ekonomi Regional sebagai berikut:

1. Prinsip *imperfect immobility of land and other productive factors*
2. Prinsip *imperfect divisibility of production factors and other goods and services*
3. Prinsip *imperfect mobility of goods and services*

Immobility of land and other productive factors berarti ketidakmampuan lahan dan faktor-faktor produksi lainnya untuk berpindah tempat. Ketidakmampuan tersebut bersifat tidak sempurna (*imperfect*), maksudnya beberapa faktor produksi walau pada dasarnya tidak berpindah (*immobile*), namun untuk sebagian masih dapat berpindah juga. Dengan rumusan lain, faktor-faktor produksi dapat berpindah tempat, namun untuk berpindah tempat ada biayanya.

Prinsip pertama ini (sering disebut sebagai prinsip *natural endowment* atau “anugerah alamiah”) menjadi penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa kegiatan pertanian sawah banyak terdapat di Pantai Utara Jawa? Mengapa industri pertambangan emas ada di Papua? Mengapa industri pertambangan minyak tumbuh di Riau dan Kalimantan Timur? Mengapa industri pariwisata berkembang pesat di Pulau Bali? Mengapa industri kayu ukir-ukiran tumbuh di Jepara? Mengapa industri gerabah (bakaran tanah liat) berkembang di Kasongan Yogyakarta?

Pertanian sawah banyak terdapat di Pantai Utara Jawa karena lahannya subur dan cocok untuk tanaman padi. Mustahil lahan itu dipindahkan ke daerah lain. Demikian juga tambang emas, memang adanya di Papua. Bagaimana mungkin kita memindahkan tambang itu ke tempat lain? Hal yang sama juga berlaku untuk minyak di Riau atau Kalimantan Timur. Mungkin industri pengolahan minyak mentah dapat dibangun di tempat lain, namun bukan lahan pertambangannya yang dipindahkan.

Serupa dengan itu adalah fenomena perkembangan pariwisata di Pulau Bali, industri kayu ukir-ukiran di Jepara, dan industri gerabah di Kasongan Yogyakarta. Pemandangan alam yang indah mustahil dipindahkan. Kebudayaan masyarakat yang unik juga sulit dipindahkan. Seniman tari, seniman ukir-ukiran kayu, atau seniman gerabah mungkin bisa dipindahkan, namun biayanya besar sekali.

Demikianlah, prinsip pertama ilmu ekonomi regional, yakni prinsip *imperfect immobility of land and other productive factors* (ketidakmampuan berpindah tempat secara tak sempurna lahan dan faktor-faktor produktif lainnya) dapat menjelaskan perilaku spasial para pelaku ekonomi. Perilaku spasial dalam hal ini adalah cara pengambilan keputusan oleh pelaku ekonomi dalam hal memilih tempat kegiatan ekonominya.

Prinsip kedua adalah *imperfect divisibility of production factors and other goods and services* yang berarti kemampuan dibagi (dipilah) secara tak sempurna yang dimiliki oleh faktor-faktor produksi dan barang-barang dan jasa-jasa lainnya. Maksudnya, ada batas ukuran minimum penggunaan faktor produksi untuk terjadinya proses produksi. Kalau seseorang bermaksud berjualan minuman kopi dengan membuka warung, tentu jarang sekali atau bahkan mustahil ia berencana menjual setengah cangkir per hari. Barangkali lebih masuk akal kalau ia berencana menjual lima puluh atau bahkan seratus cangkir per hari. Bahkan bila digeneralisasikan, skala penjualan yang semakin besar (sampai batas tertentu) semakin menguntungkan. Pasalnya, untuk berjualan minuman kopi ia perlu sewa ruangan (warung) yang pembayaran sewanya mungkin dihitung secara harian (atau mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan). Ongkos sewa ruangan itu sering disebut sebagai biaya tetap (*fixed cost*), artinya besaran uang sewa ruangan itu tidak bergantung pada berapa banyak minuman kopi yang terjual. Apakah dalam sehari terjual lima puluh atau seratus cangkir kopi, ongkos sewa ruangan tetap tidak berubah. Bila demikian, maka rata-rata biaya tetap (*average fixed cost*), yakni total biaya tetap dibagi dengan banyaknya produk yang terjual,

akan mengecil seiring dengan semakin banyaknya produk yang terjual. Dengan kata lain skala produksi menimbulkan penghematan.

Dalam bahasa Inggris penghematan itu disebut *economies of scale* atau *scale economies*, artinya penghematan-penghematan yang timbul oleh karena skala yang membesar. Awas, jangan menerjemahkan *scale economies* menjadi “skala ekonomi”. Ingatlah, dalam bahasa Inggris berlaku hukum MD (menerangkan-diterangkan), yakni kata yang di depan menerangkan kata di belakangnya, contohnya *black box* harus diterjemahkan menjadi “kotak hitam”.

Dalam Modul 3 akan dibahas lebih lanjut perampatan (generalisasi) dari prinsip penghematan akibat skala tersebut. Kemudian akan ditunjukkan bahwa bila kegiatan-kegiatan ekonomi yang sejenis atau bahkan beragam jenis terjadi di suatu tempat tertentu, maka keberkumpulan itu juga akan menimbulkan penghematan-penghematan. Dalam bahasa Inggris gejala itu disebut sebagai *economies of concentration*, *economies of agglomeration*, *economies of localization*, dan *economies of urbanization*. Apakah makna tiap prinsip itu? Sabarlah, tunggu sampai giliran pembahasan Modul 3 tiba.

Prinsip ketiga adalah prinsip *imperfect mobility of goods and services* yang bermakna bahwa mobilitas (kemampuan berpindah tempat) barang dan jasa bersifat tidak sempurna. Artinya, untuk berpindah tempat dibutuhkan biaya. Itulah yang disebut biaya transportasi dan biaya komunikasi. Biaya transportasi adalah biaya pengangkutan atau biaya perjalanan. Biaya komunikasi adalah biaya penyampaian informasi di antara para pelaku ekonomi. Dalam hal ini informasi dipandang sebagai faktor produksi atau komoditas (barang atau jasa).

Prinsip ketiga ini membatasi berlakunya prinsip pertama (*natural endowment*) dan prinsip kedua (*economies of concentration*). Misalnya, dapat saja suatu wilayah dikaruniani kesuburan lahan yang mampu menghasilkan buah-buahan melimpah. Namun manfaat kelimpahan hasil panen buah-buahan itu terbatas, karena untuk mengangkutnya hingga mencapai konsumen akhir ada biayanya. Serupa dengan itu, dapat saja sebuah kota menjadi sangat efisien berkat penghematan-penghematan yang muncul seiring dengan berkumpulnya berbagai kegiatan ekonomi. Namun produk-produk yang dihasilkannya tetap perlu diangkut ke konsumen akhir atau konsumen akhir perlu menuju ke kota itu untuk dapat menikmati produk-produk tersebut. Akibatnya, ada biaya pengangkutan atau biaya

transportasi yang harus ditanggung dan membatasi manfaat yang muncul dari penghematan-penghematan tersebut.

Dalam kegiatan belajar berikut ini (KB-2) kita akan kembali membahas pertanyaan-pertanyaan dalam ilmu ekonomi regional, khususnya yang menyangkut unsur kedua dari ilmu ini, yakni Teori Pertumbuhan Wilayah. Pertanyaan-pertanyaan itu sekaligus melengkapi gambaran tentang ruang lingkup ilmu ekonomi regional.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan definisi tentang ilmu ekonomi regional.
- 2) Apakah yang dimaksud dengan perilaku spasial rumah tangga?
- 3) Berikan contoh perilaku spasial perusahaan.
- 4) Apakah yang dimaksud dengan prinsip bahwa lahan dan faktor-faktor produksi lainnya tidak mampu berpindah tempat?
- 5) Berikan contoh bahwa mobilitas (kemampuan berpindah tempat) barang dan jasa bersifat tidak sempurna.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi. Sebutkan ciri khasnya.
- 2) Spasial artinya yang berkaitan dengan tata ruang.
- 3) Ingatlah bahwa perusahaan bertujuan memaksimumkan laba. Rincilah apa yang perlu dilakukan perusahaan (yang berkaitan dengan tata ruang) untuk mencapai tujuan itu.
- 4) Coba jelaskan apa akibat dari kenyataan bahwa lahan tidak mampu pindah tempat.
- 5) Kaitkanlah dengan biaya pengangkutan.

**RANGKUMAN**

Ilmu ekonomi regional adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip ilmu ekonomi untuk menjelaskan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan perilaku spasial para pelaku ekonomi dalam mencapai tujuan mereka masing-masing. Pelaku ekonomi adalah rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atau negara. Rumah tangga memilih lokasi rumah untuk mukim. Perusahaan menentukan lokasi kegiatan usahanya. Pemerintah mengambil keputusan tentang lokasi bagi kegiatan-kegiatannya. Ketiga pelaku ekonomi tersebut berinteraksi dan saling memengaruhi sehingga menghasilkan kesetimbangan tata ruang. Pola-pola kesetimbangan itu terbentuk berdasarkan tiga prinsip, yaitu prinsip bahwa lahan dan faktor-faktor produksi lainnya tidak mampu berpindah tempat, prinsip bahwa faktor-faktor produksi serta barang dan jasa lainnya tidak mampu dibagi (dipilah) secara sempurna, dan prinsip bahwa mobilitas (kemampuan berpindah tempat) barang dan jasa bersifat tidak sempurna.

**TES FORMATIF 1**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempunyai ciri khas....
 - A. Membahas hubungan antarnegara
 - B. Membahas tata ruang (persoalan spasial)
 - C. Membahas *supply* dan *demand*
 - D. Membahas interaksi antara perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah
- 2) Contoh perilaku spasial rumah tangga yang dibahas di dalam ilmu ekonomi regional....
 - A. Rumah tangga merancang luas kamar tamunya
 - B. Rumah tangga memutuskan lokasi mukimnya
 - C. Rumah tangga menentukan lokasi kamar tidur di tempat mukimnya
 - D. Rumah tangga menetapkan jumlah lantai rumahnya

- 3) Contoh perilaku spasial perusahaan yang dibahas di dalam ilmu ekonomi regional....
 - A. Perusahaan menetapkan gaji karyawannya
 - B. Perusahaan merencanakan lokasi pabriknya
 - C. Perusahaan memberhentikan karyawannya
 - D. Perusahaan menentukan lokasi kamar kerja manajernya

- 4) Contoh perilaku spasial pemerintah yang dibahas di dalam ilmu ekonomi regional....
 - A. Pemerintah menetapkan tarif pajak
 - B. Pemerintah meningkatkan subsidi bagi rumah tangga miskin
 - C. Pemerintah merancang lokasi markas pemadam kebakaran
 - D. Pemerintah memperbaiki kualitas pelayanan publik

- 5) Tujuan ekonomi pemerintah adalah....
 - A. Memaksimumkan kesejahteraan rakyat
 - B. Memaksimumkan pendapatan dari pajak
 - C. Meminimumkan nilai total impor
 - D. Memaksimumkan nilai total ekspor

- 6) Para pelaku ekonomi (rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah) berinteraksi dan saling memengaruhi, contohnya dalam bahasan Ilmu Ekonomi Regional adalah....
 - A. Rumah tangga menyewakan tenaga kerja ke perusahaan, perusahaan menggaji tenaga kerja.
 - B. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, pemerintah menjamin keamanan perusahaan.
 - C. Rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah, pemerintah menyediakan layanan pendidikan kepada rumah tangga.
 - D. Perusahaan mendirikan sebuah pabrik, para pekerjanya bermukim di sekitar lokasi pabrik itu.

- 7) Perusahaan dalam memilih lokasi kegiatannya disebut berorientasi kepada input (mendekati lokasi input), karena proses produksinya mengubah input (yang berat) menjadi output (yang ringan), contohnya....
 - A. Pengolah kayu gelondongan menjadi produk kayu setengah jadi
 - B. Perakit mobil dengan input suku cadang
 - C. Pembuat roti
 - D. Pembuat bahan peledak berbahaya

- 8) Perusahaan dalam memilih lokasi kegiatannya disebut berorientasi kepada input (mendekati lokasi pembelian input) atau berorientasi kepada *output* (mendekati lokasi penjualan *output*), berdasarkan pertimbangan....
- A. Kenyamanan suasana kerja
 - B. Ketersediaan tenaga kerja
 - C. Peminimuman biaya pengangkutan
 - D. Keramaian pasar (tingkat permintaan terhadap *output*)
- 9) Akibat dari prinsip bahwa lahan dan faktor-faktor produksi lainnya tidak mampu berpindah tempat adalah....
- A. Harga lahan mahal di mana-mana
 - B. Pemilihan lokasi produksi harus mempertimbangkan biaya transportasi
 - C. Tiap perusahaan perlu memilih lokasi produksi yang dekat dengan lokasi input
 - D. Tiap perusahaan perlu berhemat dalam penggunaan input-input produksi
- 10) Pengertian dari kesetimbangan tata ruang adalah....
- A. Permintaan akan lahan sama dengan pasokan lahan
 - B. Harga lahan mencapai titik optimum, tingkat upah mencapai titik optimum, dan laba mencapai titik maksimum
 - C. Tiap pelaku ekonomi tidak dapat menaikkan tingkat ketercapaian tujuannya dengan cara mengubah lokasi usahanya
 - D. Para pelaku usaha bekerja sama dalam mencapai tujuan masing-masing

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Pertanyaan dalam Ilmu Ekonomi Regional: Bagaimana Wilayah Bertumbuh?

Ilmu ekonomi regional dapat dipilah menjadi dua bagian besar, yaitu bagian pertama adalah teori lokasi dan bagian kedua teori pertumbuhan wilayah. Dalam kegiatan belajar yang lalu (KB-1) telah dibahas unsur-unsur dan contoh-contoh penerapan Teori Lokasi. Dalam kegiatan belajar ini (KB-2) kita akan membahas juga unsur-unsur dan contoh-contoh penerapan teori pertumbuhan wilayah.

Apabila seluruh nilai produk, baik barang maupun jasa, yang dihasilkan dalam sebuah wilayah dijumlahkan untuk masa satu tahun, maka hasil penjumlahan itu disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Badan Pusat Statistik (BPS) tiap tahun menerbitkan data PDRB baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Agar supaya secara rata-rata kesejahteraan masyarakat meningkat, PDRB harus meningkat dari tahun ke tahun. Bila jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu meningkat, sedangkan PDRB tidak meningkat, maka secara rata-rata kesejahteraan masyarakat menurun. Ibaratnya, “kue” yang tersedia dalam sebuah keluarga harus membesar seiring dengan meningkatnya jumlah anggota dalam keluarga itu, supaya dengan demikian secara rata-rata bagian “kue” yang tersedia bagi tiap anggota keluarga itu tidak mengecil.

Tabel 1.1. PDRB (2010=100) Provinsi-provinsi di Indonesia 2011-2015 (Miliar Rupiah)

Provinsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
Aceh	104 874,2	108 914,9	111 755,8	113 487,8	112 672,4
Sumatera Utara	353 147,6	375 924,1	398 727,1	419 573,3	440 955,9
Sumatera Barat	111 679,5	118 724,4	125 940,6	133 316,1	140 529,2
Riau	410 215,8	425 626,0	436 187,5	447 951,6	448 936,6
Jambi	97 740,9	104 615,1	111 766,1	119 984,7	125 038,7

Provinsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
Sumatera Selatan	206 360,7	220 459,2	232 175,0	243 093,8	254 022,9
Bengkulu	30 295,1	32 363,0	34 326,4	36 206,7	38 067,5
Lampung	160 437,5	170 769,2	180 620,0	189 790,0	199 525,4
Kep. Bangka Belitung	38 014,0	40 104,9	42 190,9	44 159,4	45 961,5
Kep. Riau	118 961,4	128 035,0	137 263,9	146 355,6	155 162,6
DKI Jakarta	1 147 558,2	1 222 527,9	1 296 694,6	1 373 389,5	1 454 102,1
Jawa Barat	965 622,1	1 028 409,7	1 093 543,5	1 149 231,4	1 207 001,5
Jawa Tengah	656 268,1	691 343,1	726 655,1	764 992,6	806 609,0
DI Yogyakarta	68 049,9	71 702,4	75 627,4	79 532,3	83 461,6
Jawa Timur	1 054 401,8	1 124 464,6	1 192 789,8	1 262 697,1	1 331 418,2
Banten	290 545,8	310 385,6	331 099,1	349 205,7	367 959,2
Bali	99 991,6	106 951,5	114 103,6	121 779,1	129 137,9
Nusa Tenggara Barat	67 379,1	66 340,8	69 766,7	73 298,1	88 866,7
Nusa Tenggara Timur	46 334,1	48 863,2	51 505,2	54 106,3	56 820,1
Kalimantan Barat	90 797,6	96 161,9	101 980,3	107 113,8	112 261,2
Kalimantan Tengah	60 492,9	64 649,2	69 411,0	73 724,9	78 890,0
Kalimantan Selatan	91 252,1	96 697,8	101 850,5	106 791,3	110 890,7
Kalimantan Timur	445 264,4	469 646,3	438 532,9	445 418,6	439 716,1

Provinsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
Kalimantan Utara	–	–	44 091,7	47 696,8	49 188,7
Sulawesi Utara	54 910,9	58 677,6	62 422,5	66 359,4	70 418,8
Sulawesi Tengah	56 833,8	62 249,5	68 219,3	71 676,1	82 829,2
Sulawesi Selatan	185 708,5	202 184,6	217 589,1	233 998,7	250 729,6
Sulawesi Tenggara	53 546,7	59 785,4	64 268,7	68 290,6	72 988,3
Gorontalo	16 669,1	17 987,1	19 367,6	20 775,7	22 070,4
Sulawesi Barat	19 027,5	20 786,9	22 227,4	24 200,1	25 983,4
Maluku	19 597,4	21 000,1	22 100,9	23 562,8	24 843,7
Maluku Utara	16 002,5	17 120,1	18 208,7	19 206,3	20 377,5
Papua Barat	42 867,2	44 423,3	47 694,2	50 287,0	52 347,4
Papua	106 066,7	107 890,9	117 118,8	121 580,1	131 270,9
Jumlah 34 Provinsi	7 286 914,8	7 735 785,5	8 177 822,3	8 602 833,6	9 031 054,8

Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber: Statistik Indonesia 2016 (BPS).

Sebagaimana sebuah perusahaan, PDRB sebuah wilayah dapat diibaratkan dihasilkan oleh suatu proses produksi yang besarnya bergantung pada input-input yang diolah dengan teknologi yang digunakan. Input-input itu berupa tenaga kerja manusia dan kapital. Dalam sektor pertanian input-input itu dapat berupa lahan, benih, pupuk, obat-obatan, mesin-mesin pertanian, dan sebagainya. Dalam sektor manufaktur input-input itu dapat berupa bahan baku atau bahan mentah, mesin-mesin pengolah yang tersedia di pabrik-pabrik, dan sebagainya. Dalam sektor jasa, input dapat berupa barang atau jasa yang kemudian melalui suatu proses nilainya menjadi bertambah tinggi. Intinya, tiap proses produksi menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai lebih tinggi daripada nilai bahan bakunya.

Agar nilai PDRB meningkat dari tahun ke tahun, maka jumlah maupun kualitas input-input produksi perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Dalam hal tenaga kerja manusia, jumlah maupun kualitasnya perlu meningkat. Jumlah tenaga kerja dapat meningkat secara alamiah (laju kelahiran lebih besar daripada laju kematian) atau melalui perpindahan penduduk (migrasi, kepindahan masuk penduduk ke suatu wilayah dari wilayah lain). Kualitas tenaga kerja dapat diukur berdasarkan tingkat keterampilan yang dikuasai. Kualitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Tak kalah pentingnya adalah teknologi, yakni tata cara berproduksi. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi perlu terus ditingkatkan. Suatu teknologi dikatakan lebih efisien jika dengan jumlah input yang sama dapat dihasilkan produk yang lebih banyak atau kualitas yang lebih baik.

Dengan demikian, supaya sebuah wilayah dapat berkembang dibutuhkan investasi, yakni penanaman modal untuk meningkatkan jumlah dan kualitas input-input produksi yang diolah dalam wilayah tersebut. Investasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi teknologi yang digunakan dalam proses produksi di wilayah itu. Bila ditelusuri lebih jauh lagi, akan ada kesimpulan lebih lanjut bahwa laju atau kecepatan perkembangan suatu wilayah bergantung pula pada tali-temali dalam tata kelembagaan, termasuk di dalamnya struktur budaya, politik, hukum, dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat dalam wilayah itu. Kadang-kadang unsur ini disebut sebagai infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) yang melingkupi mekanisme kerja perekonomian dalam wilayah itu.

Tabel 1.2. PDRB per kapita (2010=100) Provinsi di Indonesia 2011-2015 (Ribu Rp)

Provinsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
Aceh	22 704,8	23 099,1	23 228,6	23 128,5	22 525,5
Sumatera Utara	26 711,2	28 036,9	29 339,2	30 477,1	31 637,4
Sumatera Barat	22 638,8	23 744,0	24 857,6	25 978,0	27 044,1
Riau	71 637,9	72 396,3	72 297,1	72 385,2	70 761,1
Jambi	30 856,7	32 417,7	34 012,1	35 876,1	36 753,4
Sumatera Selatan	27 158,0	28 577,9	29 656,8	30 610,6	31 546,6
Bengkulu	17 282,3	18 143,5	18 919,3	19 626,5	20 303,8
Lampung	20 739,3	21 794,8	22 770,7	23 646,3	24 580,3

Provinsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
Kep. Bangka Belitung	30 212,2	31 172,4	32 081,3	32 859,6	33 480,1
Kepulauan Riau	68 024,2	70 930,0	73 743,3	76 329,7	78 643,0
DKI Jakarta	117 672,9	123 962,4	130 060,3	136 312,4	142 868,6
Jawa Barat	21 976,5	23 036,0	24 118,3	24 967,2	25 840,5
Jawa Tengah	20 053,8	20 950,6	21 844,9	22 820,2	23 882,5
DI Yogyakarta	19 387,4	20 183,9	21 037,7	21 866,9	22 684,7
Jawa Timur	27 864,3	29 508,4	31 092,0	32 703,7	34 272,9
Banten	26 548,9	27 716,5	28 910,7	29 834,2	30 778,2
Bali	25 266,0	26 689,6	28 129,7	29 666,8	31 096,6
Nusa Tenggara Barat	14 705,8	14 276,7	14 809,8	15 354,3	18 377,6
Nusa Tenggara Timur	9 675,9	10 031,0	10 396,8	10 742,0	11 097,5
Kalimantan Barat	20 227,2	21 062,2	21 971,9	22 712,4	23 438,5
Kalimantan Tengah	26 588,9	27 749,0	29 106,4	30 216,9	31 619,2
Kalimantan Selatan	24 567,5	25 547,8	26 423,9	27 223,3	27 793,6
Kalimantan Timur	121 196,2	124 501,9	133 868,7	132 904,0	128 322,9
Kalimantan Utara	–	–	74 106,9	77 153,3	76 625,5
Sulawesi Utara	23 813,0	25 146,0	26 445,9	27 805,0	29 194,0
Sulawesi Tengah	21 105,7	22 724,5	24 491,0	25 315,8	28 793,1
Sulawesi Selatan	22 769,2	24 507,2	26 083,4	27 750,7	29 427,3
Sulawesi Tenggara	23 338,1	25 489,8	26 815,4	27 895,5	29 201,2
Gorontalo	15 687,7	16 650,3	17 639,1	18 622,3	19 476,2
Sulawesi Barat	16 023,4	17 169,1	18 008,8	19 235,6	20 264,7

Provinsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
Maluku	12 477,2	13 129,1	13 572,1	14 216,7	14 730,9
Maluku Utara	14 994,6	15 691,0	16 332,2	16 867,4	17 532,0
Papua Barat	54 539,9	55 047,8	57 581,4	59 174,5	60 065,9
Papua	36 383,2	36 280,0	38 621,4	39 333,0	41 681,2
Jumlah 34 Provinsi	30 112,4	31 519,9	32 866,7	34 115,9	35 351,9

Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara
 Sumber: Statistik Indonesia 2016 (BPS).

Setelah dapat dipastikan bahwa perekonomian suatu wilayah tumbuh secara mantap, masih ada satu lagi masalah ekonomi wilayah yang sangat penting, yakni bagaimana “kue perekonomian” (maksudnya, keseluruhan hasil proses produksi yang terjadi di wilayah itu), yang akan bertambah besar seiring dengan berjalannya waktu, dibagi-bagikan di antara para pelaku ekonomi dalam wilayah itu. Bila pembagiannya tidak merata, misalnya yang kaya justru memperoleh bagian yang lebih besar, sedangkan yang miskin hanya memperoleh bagian yang lebih kecil, maka akan terbentuk masyarakat yang timpang. Situasi ini tidak baik untuk pembangunan di wilayah itu. Ketimpangan kerap menimbulkan perasaan negatif yang disebut kecemburuan sosial. Ketimpangan yang parah bahkan dapat menimbulkan gejala terjadinya peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat yang tidak disertai dengan penurunan persentase atau jumlah orang miskin. Warga masyarakat yang miskin biasanya sulit memperoleh akses pada fasilitas sosial seperti pendidikan dan kesehatan, akibatnya adalah bahwa mereka menjadi sumber daya manusia yang kurang produktif.

Dengan demikian, perlu dipastikan bahwa perekonomian wilayah terus tumbuh dan seiring dengan itu terjadi pula proses pemerataan pendapatan yang dapat melahirkan masyarakat yang adil dengan kesejahteraan yang merata. Selain itu, pertumbuhan ekonomi wilayah harus pula bersifat ramah lingkungan sehingga ketersediaan dan kualitas sumber daya alam tetap terjaga dan lestari. Pembangunan yang sehat adalah yang tumbuh sehingga rata-rata kesejahteraan masyarakat meningkat, kemudian hasil pertumbuhan itu dibagikan sedemikian rupa agar ketimpangan pendapatan membaik, dan proses pertumbuhan itu harus bersifat berkelanjutan (*sustainable*).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apakah yang dimaksud dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)?
- 2) Apakah syarat perlu (*necessary condition*) agar PDRB per kapita (pendapatan rata-rata penduduk) tidak merosot ketika jumlah penduduk naik?
- 3) Apakah bila PDRB naik, maka dapat dipastikan pendapatan tiap penduduk naik?
- 4) Apa akibat dari ketimpangan pendapatan terhadap upaya pembangunan ekonomi?
- 5) Mengapa pembangunan harus ramah terhadap lingkungan hidup?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Camkanlah paragraf kedua teks kegiatan belajar ini.
- 2) Ibarat kue yang dimakan oleh sebuah keluarga, apabila jumlah anggota keluarga naik, maka volume kue itu perlu diperbesar agar bagian yang dinikmati oleh seorang anggota keluarga itu secara rata-rata tidak berkurang.
- 3) Penting sekali untuk memperhatikan bagaimana kue itu dibagikan kepada para anggota keluarga itu. Bila pembagiannya tidak merata, maka membesarnya kue itu tidak dengan sendirinya menjamin bahwa yang dinikmati oleh seorang anggota rumah tangga juga membesar. Bila pembagiannya tidak merata, maka terjadinya ketimpangan.
- 4) Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan sebagian warga masyarakat tidak hidup layak sehingga tidak produktif dan tidak mampu menyumbangkan tenaga secara optimum bagi penciptaan barang dan jasa di suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan dapat juga menimbulkan kecemburuan sosial yang tidak baik bagi suasana kerja dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu proses penciptaan barang dan jasa. Ketimpangan pendapatan juga berlawanan dengan prinsip keadilan sosial.

- 5) Sikap ramah terhadap lingkungan hidup diperlukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Bila tidak dijaga, maka kualitas dan kualitas sumber daya alam dapat merosot dari waktu ke waktu. Bila itu terjadi, maka orang-orang pada zaman sekarang berlaku tidak adil pada orang-orang yang akan lahir di kemudian hari.



RANGKUMAN

Kegiatan belajar ini membahas arti pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan faktor-faktor pembentuknya. Dijelaskan juga alasan mengapa bila jumlah penduduk naik, maka PDRB juga diharapkan naik. Di samping itu, penting juga diperhatikan persoalan pemerataan pendapatan. Bagian terakhir kegiatan belajar ini menguraikan pentingnya memastikan bahwa upaya pembangunan perlu ramah terhadap lingkungan hidup.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Faktor-faktor penentu besarnya PDRB adalah....
 - A. Tenaga kerja, kapital, dan budaya
 - B. Lahan, modal, budaya, bahasa, dan geografi
 - C. Lahan, kapital, tenaga kerja, dan teknologi
 - D. Luas wilayah per satu penduduk, jarak dari ibukota, akses ke perdagangan internasional
- 2) PDRB tidak dipengaruhi oleh....
 - A. Jumlah jenis musim dalam setahun
 - B. Kualitas pendidikan anak-anak
 - C. Kesuburan tanah
 - D. Investasi
- 3) Perekonomian suatu wilayah dapat bertumbuh karena....
 - A. Pemerintah mengurangi anggaran untuk gaji pegawai tinggi di wilayah itu
 - B. Pemerintah menambah hari libur nasional
 - C. Pemerintah meningkatkan investasi untuk pembangunan infrastruktur di wilayah itu
 - D. Pemerintah membebaskan biaya pendidikan dasar

- 4) Pertumbuhan ekonomi wilayah dapat terganggu oleh....
 - A. Belanja rumah tangga yang turun dari waktu ke waktu
 - B. Pengeluaran pemerintah naik dari waktu ke waktu
 - C. Investasi asing meningkat dari waktu ke waktu
 - D. Jumlah pejabat yang terduga korupsi meningkat dari waktu ke waktu
- 5) Bila PDRB naik, maka....
 - A. Kesejahteraan tiap penduduk meningkat, asalkan ada kejelasan siapa yang kaya dan siapa yang miskin
 - B. Kemiskinan berkurang, asalkan golongan kaya makin kaya
 - C. Pendapatan penduduk makin merata, asalkan ada subsidi pendidikan
 - D. PDRB per kapita naik, asalkan jumlah penduduk tetap
- 6) Pemerataan pendapatan bergantung kepada....
 - A. Jumlah penduduk
 - B. Tingkat kesejahteraan
 - C. Perbandingan antara pendapatan satu penduduk dengan penduduk lainnya
 - D. Tingkat kesejahteraan penduduk secara total dibagi jumlah penduduk
- 7) Ketimpangan pendapatan tidak menjadi semakin parah bila....
 - A. Yang kaya menjadi makin kaya, yang miskin menjadi makin miskin
 - B. Yang kaya berkurang kekayaannya, yang miskin makin kaya
 - C. Kekayaan golongan kaya bertumbuh 10%, kekayaan golongan miskin bertumbuh 10%
 - D. Kekayaan golongan kaya bertumbuh perlahan, kekayaan golongan miskin tetap
- 8) Akibat buruk dari ketimpangan makin parah antara lain....
 - A. Kemiskinan meningkat
 - B. Kecemburuan sosial meningkat
 - C. Penyakit menular mewabah
 - D. Pertumbuhan ekonomi terganggu
- 9) Upaya pelestarian lingkungan tidak berkaitan dengan
 - A. Tata cara pengelolaan sampah
 - B. Kebiasaan menggunakan air secara boros
 - C. Penggundulan hutan
 - D. Tertib berlalu lintas

- 10) Upaya pelestarian lingkungan perlu diterapkan pada tiap kegiatan ekonomi....
- A. Karena upaya itu berdampak langsung pada keadilan antargolongan masyarakat
 - B. Untuk mendorong pertumbuhan PDRB
 - C. Agar supaya terjadi pemerataan pendapatan antarwilayah
 - D. Agar supaya terjadi keadilan antargenerasi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Permasalahan Ekonomi Regional
di Indonesia

Mengapa di Jawa wilayah pantai utara tumbuh lebih pesat daripada wilayah pantai selatan? Untuk bagian barat, bandingkanlah perekonomian wilayah Kabupaten Bekasi dan wilayah Kabupaten Lebak. Tiga puluh atau empat puluh tahun yang lalu kedua perekonomian itu didominasi kegiatan pertanian. Kini di kedua perekonomian itu peran sektor pertanian surut, baik dalam hal sumbangannya bagi PDRB masing-masing maupun jumlah tenaga kerja yang bekerja di setor pertanian. Baik dulu maupun sekarang Bekasi lebih cepat bertumbuh daripada Lebak. Tanah di utara ternyata lebih subur daripada tanah di selatan, sehingga sektor pertanian sebagai sektor pendorong perekonomian wilayah lebih mudah berkembang di pantai utara. Tambahan lagi, Bekasi mempunyai akses keluar yang lebih mudah untuk mencapai pusat-pusat pertumbuhan termasuk Jakarta, ibukota negara sekaligus jantung kegiatan perekonomian di pantai Utara Jawa.

Tabel 1.3. Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Indonesia 2014-2015

Provinsi	2014		2015		2015	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Aceh	18,05	16,98	17,08	17,11	16,73	16,43
Sumatera Utara	9,38	9,85	10,53	10,79	10,35	10,27
Sumatera Barat	7,41	6,89	7,31	6,71	7,09	7,14
Riau	8,12	7,99	8,42	8,82	7,98	7,67
Jambi	7,92	8,39	8,86	9,12	8,41	8,37
Sumatera	13,91	13,62	14,25	13,77	13,54	13,39

Provinsi	2014		2015		2015	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Selatan						
Bengkulu	17,48	17,09	17,88	17,16	17,32	17,03
Lampung	14,28	14,21	14,35	13,53	14,29	13,86
Kep. Bangka Belitung	5,36	4,97	5,4	4,83	5,22	5,04
Kep. Riau	6,7	6,4	6,24	5,78	5,98	5,84
Dki Jakarta	3,92	4,09	3,93	3,61	3,75	3,75
Jawa Barat	9,44	9,18	9,53	9,57	8,95	8,77
Jawa Tengah	14,46	13,58	13,58	13,32	13,27	13,19
Di Yogyakarta	15	14,55	14,91	13,16	13,34	13,1
Jawa Timur	12,42	12,28	12,34	12,28	12,05	11,85
Banten	5,35	5,51	5,9	5,75	5,42	5,36
Bali	4,53	4,76	4,74	5,25	4,25	4,15
Nusa Tenggara Barat	17,25	17,05	17,1	16,54	16,48	16,02
Nusa Tenggara Timur	19,82	19,6	22,61	22,58	22,19	22,01
Kalimantan Barat	8,54	8,07	8,03	8,44	7,87	8
Kalimantan Tengah	6,03	6,07	5,94	5,91	5,66	5,36

Provinsi	2014		2015		2015	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Kalimantan Selatan	4,68	4,81	4,99	4,72	4,85	4,52
Kalimantan Timur	6,42	6,31	6,23	6,1	6,11	6
Kalimantan Utara	-	-	6,24	6,32	6,23	6,99
Sulawesi Utara	8,75	8,26	8,65	8,98	8,34	8,2
Sulawesi Tengah	13,93	13,61	14,66	14,07	14,45	14,09
Sulawesi Selatan	10,28	9,54	9,39	10,12	9,4	9,24
Sulawesi Tenggara	14,05	12,77	12,9	13,74	12,88	12,77
Gorontalo	17,44	17,41	18,32	18,16	17,72	17,63
Sulawesi Barat	12,27	12,05	12,4	11,9	11,74	11,19
Maluku	19,13	18,44	19,51	19,36	19,18	19,26
Maluku Utara	7,3	7,41	6,84	6,22	6,33	6,41
Papua Barat	27,13	26,26	25,82	25,73	25,43	24,88
Papua	30,05	27,8	28,17	28,4	28,54	28,4
Indonesia	11,25	10,96	11,22	11,13	10,86	10,7

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017.

Apabila keadaan tersebut di atas terus berlangsung, maka dapat diperkirakan bahwa ketimpangan perkembangan ekonomi antarwilayah di bagian barat Pulau Jawa bakal makin parah di masa mendatang. Celakanya, perbedaan tingkat kesejahteraan antarwilayah mendorong kepindahan tenaga kerja (migrasi antarwilayah) dari wilayah yang lebih miskin ke wilayah yang lebih kaya. Tiap tahun, terutama sehabis liburan panjang perayaan Idul Fitri, ribuan orang dari bagian timur dan bagian selatan Pulau Jawa bermigrasi berbondong-bondong menuju Jakarta dan sekitarnya untuk mengadu nasib mencari kesempatan kerja. Akibatnya, Kota Metropolitan Jakarta yang sering disebut sebagai Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) semakin padat penduduknya.

Tabel 1.4. Kepadatan Penduduk Provinsi-provinsi di Indonesia 2005-2015

Provinsi	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2013	2014	2015
Aceh	72	78	75	76	77	78	83	85	86
Sumatera Utara	171	172	177	180	182	179	186	189	191
Sumatera Barat	108	108	111	113	114	116	121	122	124
Riau	55	54	58	59	60	64	69	71	73
Jambi	58	50	60	61	62	62	66	67	68
Sumatera Selatan	113	74	116	118	120	82	85	87	88
Bengkulu	79	79	82	83	84	86	91	93	94
Lampung	188	204	193	196	199	220	229	232	234
Kep. Bangka Belitung	65	66	67	68	69	75	80	82	84
Kep. Riau	158	15	172	180	187	206	227	234	241
Dki Jakarta	1201	13499	1224	12355	1245	14518	1501	15173	1532

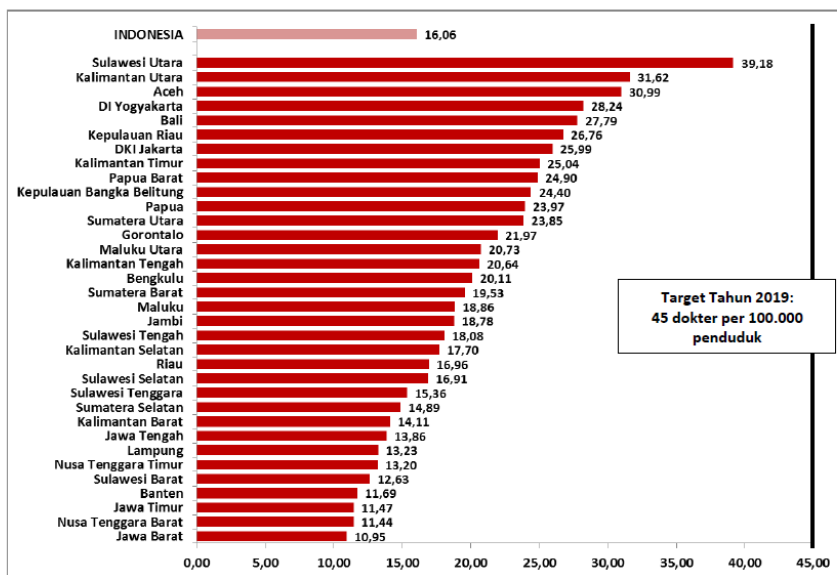
Provinsi	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2013	2014	2015
	2		5		9		5		8
Jawa Barat	1060	1146	1092	1108	1124	1222	1282	1301	1320
Jawa Tengah	972	989	987	995	1002	989	1014	1022	1030
Di Yogyakarta	1074	1064	1096	1107	1118	1107	1147	1161	1174
Jawa Timur	781	764	790	794	798	786	803	808	813
Banten	1006	1066	1045	1065	1085	1106	1185	1211	1237
Bali	625	609	639	645	652	676	702	710	718
Nusa Tenggara Barat	211	211	218	221	225	243	254	257	260
Nusa Tenggara Timur	93	92	96	98	100	97	102	103	105
Kalimantan Barat	34	28	35	35	36	30	32	32	33
Kalimantan Tengah	13	13	13	13	14	14	16	16	16
Kalimantan Selatan	85	77	87	89	90	94	99	101	103
Kalimantan Timur	15	13	16	16	16	17	19	26	27
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	8	9
Sulawesi Utara	154	141	157	158	160	164	170	172	174
Sulawesi Tengah	34	37	35	36	36	43	45	46	47

Provinsi	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2013	2014	2015
Sulawesi Selatan	162	87	167	169	171	173	179	180	182
Sulawesi Tenggara	53	52	55	56	58	59	63	64	66
Gorontalo	77	77	79	80	81	93	98	99	101
Sulawesi Barat	59	11	61	61	63	69	74	75	76
Maluku	27	27	27	28	29	33	35	35	36
Maluku Utara	23	30	24	24	25	33	35	36	36
Papua Barat	6	22	6	6	6	8	9	9	9
Papua	6	8	7	7	7	9	10	10	10
Indonesia	118	118	121	123	124	124	130	132	134

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017.

Kepadatan penduduk yang meningkat sangat pesat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Inti persoalannya adalah bahwa laju pembangunan jalan raya tidak secepat laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang meningkat pesat seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Masalah ini menjadi makin parah karena banyak daerah terlambat membangun sistem pengangkutan yang efisien. Pengangkutan penumpang secara massal dapat ditingkatkan efisiensinya bila dikelola dalam skala besar (di banyak negara maju dikelola oleh pemerintah) dengan mengandalkan angkutan rel (kereta bawah tanah, monorel, trem, dan sebagainya). Di Jabodetabek moda angkutan massal masih mengandalkan mobil ukuran kecil (angkutan kota, atau angkutan pedesaan) yang sangat tidak efisien, artinya daya angkut (jumlah penumpang yang dapat diangkut) per satuan energi (misalnya, per liter bensin premium) relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan daya angkut kendaraan berbasis rel. Akibatnya, ongkos pengangkutan menjadi

amat mahal, dan pencemaran udara semakin parah. Kualitas hidup wilayah dengan laju perkembangan sangat pesat menjadi memburuk.



Gambar 1.1. Jumlah dokter per 100 ribu penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia 2015

Ketimpangan kesejahteraan antarwilayah diperparah oleh kurang meratanya persebaran pembangunan infrastruktur. Tidak sampai 100 kilometer dari ibukota negara Jakarta ke arah barat daya, anak-anak untuk pergi ke sekolah tiap pagi harus berjuang menyeberangi sungai lebar melalui jembatan bambu yang kurang aman, bahkan ada yang harus naik perahu getek (rakit, biasanya terbuat dari bambu atau kayu). Keadaan lebih parah terdapat di daerah yang jauh dari ibukota, terpencil, atau daerah perbatasan dengan negara lain. Fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) terletak sangat jauh dari banyak daerah pedesaan tempat masyarakat bermukim. Tenaga kesehatan seperti dokter sangat langka. Demikian pula gedung sekolah dan infrastruktur sosial lainnya. Kelangkaan infrastruktur ekonomi seperti jaringan listrik, jaringan pipa penyalur air bersih, jaringan jalan juga masih menjadi masalah besar di banyak daerah terpencil di tanah air.

Apabila di suatu wilayah ketersediaan infrastruktur masih langka, maka sulit mengharapkan berkembangnya kegiatan ekonomi di wilayah itu. Apa lagi bila di wilayah itu tidak ada kekayaan sumber daya alam yang dapat diandalkan. Itulah beberapa faktor, di samping faktor-faktor lainnya, yang dapat menjelaskan mengapa beberapa kabupaten di Papua, Nusa Tenggara Timur, atau Maluku sulit sekali menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan melahirkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Masalah itu dikombinasikan dengan kegiatan ekonomi yang belum berkembang serta konektivitas yang sulit dibangun dengan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah lain melahirkan masalah baru yakni masalah pengangguran.

Sementara itu, di daerah yang relatif berlahan subur seperti di beberapa kabupaten di Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan, terdapat persoalan lain yang tak kurang seriusnya, yakni kerusakan lingkungan hidup. Pemanenan sumber daya alam melalui kegiatan penambangan yang tak terkendali, penggundulan hutan, pengubahan tata guna lahan secara seporadis (dari hutan menjadi perkebunan monokultur) telah menimbulkan masalah lingkungan hidup yang sangat serius. Di beberapa wilayah kerusakan lingkungan ini seiring dengan korupsi yang marak dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah daerah.

Pada tahun 1999, pada awal-awal era reformasi, dicanangkan gagasan otonomi daerah dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya sungguh mulia, yakni mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan cara mendekatkan rakyat dengan pengelola pelayanan publik (pemerintah daerah). Konkretnya, antara lain, pemerintah daerah berwenang mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah secara mandiri. Harapannya, pemerintah daerah dapat menyusun sendiri rencana pembangunan yang paling sesuai dengan wilayahnya masing-masing, sehingga dengan demikian diharapkan lebih tepat sasaran dan pembangunan wilayah pun dapat meningkat dengan lebih pesat. Kenyataannya, setelah berjalan sekitar dua puluh lima tahun, yang banyak terjadi adalah maraknya pemekaran daerah (munculnya kabupaten pecahan dari kabupaten induk) yang celaknya berbarengan dengan maraknya tingkat korupsi di daerah-daerah. Untuk sementara ini gagasan otonomi daerah di banyak daerah belum dapat dikatakan berhasil, karena ternyata tidak mampu memandirikan keuangan daerah. Artinya, kebanyakan daerah malah menjadi bergantung secara finansial pada anggaran pemertintah pusat. Menurut evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian

Dalam Negeri, sebagaimana dikutip oleh Majalah Berita Mingguan Tempo (9-15 Mei 2016), 80 persen daerah otonomi baru tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tentu saja, ada juga kabupaten-kabupaten yang sukses dalam meningkatkan pembangunan ekonomi wilayahnya. Majalah Berita Mingguan Tempo edisi tersebut memilih sembilan daerah sukses tersebut, yakni Kota Batu (Jawa Timur), Kota Bontang (Kalimantan Timur), Kota Banjar (Jawa Barat), Kabupaten Dharmasraya (Sumatera Barat), Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Kota Tanjungpinang (Kepulauan Riau), Kabupaten Kepulauan Meranti (Riau), dan Kabupaten Sumba Barat Daya (NTT).

Dengan contoh ilustrasi tersebut dapat digambarkan bahwa pemerintah dengan kebijakan publik (melalui perundang-undangan dan berbagai peraturan pemerintah) pembangunan perekonomian wilayah dapat secara efektif dipengaruhi. Pengaruh itu dapat bersifat positif, seperti terlihat pada naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat; namun dapat pula bersifat negatif seperti terlihat pada maraknya berbagai permasalahan perekonomian wilayah seperti yang telah dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Dengan demikian, untuk melengkapi studi Ilmu Ekonomi Regional, perlu juga kita mempelajari Ilmu Kebijakan Publik, khususnya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian wilayah.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa di Jawa wilayah pantai utara tumbuh lebih pesat daripada wilayah pantai selatan?
- 2) Mengapa terjadi migrasi (pindahan penduduk) antarwilayah?
- 3) Mengapa di beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua angka kemiskinan sulit sekali diturunkan?
- 4) Apa yang dimaksud dengan kebijakan desentralisasi?
- 5) Apa tujuan utama kebijakan desentralisasi?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Bandingkan tingkat kesuburan lahan di kedua wilayah itu.
- 2) Jelaskan tujuan orang berpindah tempat mukim.
- 3) Bandingkan tingkat kualitas sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia di wilayah-wilayah tersebut dengan hal yang sama di wilayah-wilayah lain di Indonesia.
- 4) Periksa Undang-undang tentang kebijakan desentralisasi.
- 5) Periksa Undang-undang tentang kebijakan desentralisasi.

**RANGKUMAN**

Bagian ini membahas beberapa masalah ekonomi regional di Indonesia, antara lain ketimpangan antarwilayah, migrasi antarwilayah, persebaran infrastruktur, dan kebijakan desentralisasi. Topik-topik tersebut dibahas dengan maksud memberikan gambaran awal tentang perekonomian Indonesia dari sudut pandang ekonomi regional. Selanjutnya diharapkan tumbuh minat mempelajari teori-teori dalam ilmu ekonomi regional yang dapat bermanfaat sebagai alat bantu untuk memahami persoalan-persoalan tersebut dan untuk mencari solusi dengan bantuan alat analisis tersebut.

**TES FORMATIF 3**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tingkat perkembangan ekonomi berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, karena....
 - A. Korupsi merebak di mana-mana
 - B. Bencana alam seperti banjir dan gempa bumi terjadi di mana-mana
 - C. Warisan budaya feodal dari kaum penjajah masih dominan
 - D. Kualitas sumber daya alam tersebar di wilayah-wilayah secara tidak merata
- 2) Faktor yang paling berpengaruh pada keragaman laju pertumbuhan ekonomi antarwilayah adalah....
 - A. Ketersediaan infrastruktur dasar
 - B. Jarak ke batas antarnegara terdekat

- C. Kualitas integritas kepala daerah
 - D. Angka melek huruf guru-guru SD
- 3) Angka kemiskinan terutama ditentukan oleh....
- A. Angka kejadian kecelakaan lalu lintas
 - B. Jumlah banjir rata-rata per tahun
 - C. Jumlah penduduk lulusan SMA
 - D. Tingkat ketersediaan kesempatan kerja
- 4) Angka pengangguran dapat dikurangi dengan kebijakan....
- A. Memperlonggar peraturan demo dan mogok bagi buruh
 - B. Upah minimum regional
 - C. Memperlonggar izin-izin investasi baru
 - D. Subsidi bagi orang miskin
- 5) Di bawah ini yang termasuk infrastruktur antara lain....
- A. Tingkat kecerdasan rata-rata anak usia sekolah
 - B. Jalan raya, jembatan, sungai-sungai, dan ruang terbuka hijau swasta
 - C. Pembangkit tenaga listrik beserta jaringan distribusinya
 - D. Seperangkat aturan hukum yang ditetapkan di tingkat daerah
- 6) Untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur di suatu wilayah dibutuhkan....
- A. Investasi publik untuk membangun jalan raya, jembatan, rumah sakit, gedung sekolah, jaringan untuk distribusi air bersih, dan pembangkit tenaga listrik
 - B. Tertib administrasi, khususnya pada pegawai negeri sipil, terutama untuk menegakkan disiplin, dan gerakan nasional antikorupsi
 - C. Perbanyak daya tampung program studi teknik sipil di perguruan tinggi tanpa mengesampingkan peranan pihak swasta
 - D. Penyediaan modal murah bagi wirausahawan kecil dan menengah yang disertai pelatihan-pelatihan praktis dan pendampingan oleh profesional
- 7) Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk....
- A. Mencegah tindak korupsi di daerah-daerah
 - B. Memperbanyak posisi jabatan di daerah-daerah
 - C. Memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan daerah
 - D. Mencegah berkembangnya dinasti politik

- 8) Keberhasilan kebijakan desentralisasi dapat terlihat pada....
- A. Kedewasaan masyarakat dalam hidup berdemokrasi
 - B. Kemandirian siswa-siswa sekolah menengah
 - C. Kesadaran ibu-ibu dalam memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi mereka
 - D. Peningkatan kesejahteraan dosen perguruan tinggi di daerah-daerah
- 9) Kegagalan kebijakan desentralisasi....
- A. APBD masih sangat tergantung pada APBN
 - B. Tingkat kecelakaan lalu lintas di daerah-daerah makin meningkat
 - C. Ancaman terorisme, radikalisme, dan komunisme meningkat
 - D. Budaya dan tradisi warisan para leluhur makin memudar
- 10) Kebijakan ekonomi regional di Indonesia menjadi sangat penting, karena....
- A. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan
 - B. Keragaman flora dan fauna di Indonesia termasuk paling kaya di dunia
 - C. Wilayah Indonesia sangat luas, kualitas ketersediaan sumber daya alamnya sangat beragam, dan penduduknya pun sangat banyak dan beragam
 - D. Ibukota negara berlokasi tidak di tengah-tengah wilayah Indonesia

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) B
- 3) B
- 4) C
- 5) A
- 6) D
- 7) A
- 8) C
- 9) B
- 10) C

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) A
- 3) C
- 4) A
- 5) D
- 6) C
- 7) B
- 8) B
- 9) D
- 10) D

Tes Formatif 3

- 1) D
- 2) A
- 3) D
- 4) C
- 5) C
- 6) A
- 7) C
- 8) A
- 9) A
- 10) C

Daftar Pustaka

Hoover, E.M., & Giarratani, F. (1985). *An introduction to regional economics*. New York: Alfred A Knopf.

Hotelling, H. (1929). *Stability in competition*. *Economic Journal*, 39(153), 41-57.